

ANALISIS PENERAPAN ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tiara Heranty Luiza Mooy^{1*}, dan Clara Margilina Reinamah²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

^{1,2} Jl. Adi Sucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur

*E-mail: tiaramooy@gmail.com

Abstract

Behavioral accounting considers the relationship between human behavior towards accounting and the information it generates affecting human behavior. Employee factors in behaving in the work environment are required to have good work quality. The phenomenon in the DPMPTSP of NTT Province, as based on the field reality, shows that there are still indications indicating that employee discipline at work is not well implemented, resulting in an impact on employee performance that still shows indications of ineffectiveness in both work quality and time. Based on the above explanation, this research is conducted with the aim of determining the application of behavioral accounting aspects on the performance of employees at DPMPTSP of NTT Province. This research is located at DPMPTSP of NTT Province using a qualitative descriptive method, and data collection is carried out through observation, interviews, and documentation to draw conclusions expected to address the research questions and provide results. The results of the implementation of behavioral accounting at DPMPTSP of NTT Province are quite good based on budgeting and behavior aspects. In terms of the performance of the finance department, everything has been systematic and clearly measured in detail at the Investment and Integrated Service One-Stop Office of NTT Province. The application of behavioral accounting in measuring employee performance plays a good role in creating a conducive work situation and implementing a good and healthy company governance system.

Keywords: Behavioral Accounting Aspects.

PENDAHULUAN

Persaingan Ilmu akuntansi pada saat ini berkembang pesat sehingga memunculkan beberapa cabang baru. Berawal dari kata akuntansi adalah suatu proses atau pengolahan data keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan bagi para pengguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Oktavia & Peilouw, 2023), yang biasanya hanya terfokus pada pelaporan informasi mengenai keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu perkembangan ilmu akuntansi meliputi berbagai ilmu bidang lain, misalnya seperti akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing, akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi keperilakuan.

Akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan (Suartana, 2010). Sejalan dengan dimensi akuntansi keperilakuan berkaitan dengan perilaku

manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien (Munandar & Syahputera (2021). Lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas, yaitu terdiri dari aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan, cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengomunikasikan informasi keperilakuan pada para penggunanya, dan pengembangan strategi untuk memotivasi dan memengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasi.

Akuntansi keperilakuan bukan hanya berhubungan dengan perilaku manusia saja tetapi juga berhubungan dengan kinerja. Kinerja atau *performance* merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Intansi/organisasi juga dapat berkembang sesuai keinginan setiap individu yang berada didalam organisasi tersebut.

Dalam memberikan pelayanan, pegawai diharuskan mempunyai sikap disiplin yang diterapkan pada lingkungan kerja. Disiplin pegawai yang rendah, sehingga sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang baik. Disiplin digambarkan sebagai kesanggupan pegawai dalam menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Hal yang paling sering terjadi dalam instansi/organisasi adalah ketidaksiplinan pegawai. Sejalan dengan pertanggungjawaban mengedepankan pentingnya ketepatan waktu (*timeliness*) dan kedisiplinan.

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanannya yang berdedikasi dalam pelayanan bagian perizinan. Sasaran PTSP di Provinsi NTT sebagai instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sedangkan fenomena yang terjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Prov. NTT sebagaimana berdasarkan kenyataan dilapangan ternyata masih ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa disiplin pegawai dalam bekerja kurang terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan dampak terhadap hasil kerja pegawai yang masih menunjukkan adanya indikasi yang kurang efektif baik masalah kualitas kerja dan waktu. Kualitas kerja pegawai DPMPSTP masih kurang baik terkait adanya ketidaktepatan waktu dalam hal pengelolaan keuangan harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dengan melakukan pelaporan. Hal ini bisa dilihat dalam penyelesaian penginputan laporan SPJ pengeluaran instansi yang dikerjakan setiap bulan yang masih sering terhambat dari personal berbagai bidang yang menjalankan sistem tersebut. Karena sistem apapun itu tidak bisa terlaksana kalau bukan dari pengelola sistem itu sendiri.

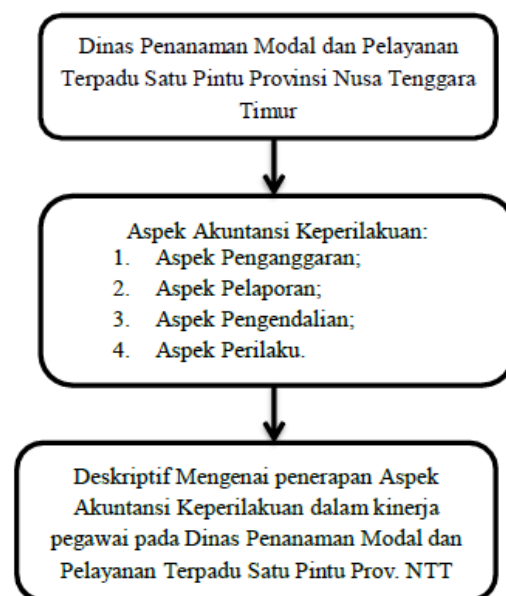
Faktor keterlambatan pegawai berdampak pada keterlambatan dalam waktu penyelesaian laporan atau tugas yang diberikan yang seharusnya dikerjakan hari yang sama namun ditunda dan dikerjakan dikemudian hari, kemudian kurangnya bukti data dalam penyelesaian laporan maka dapat membuat kerja pegawai tersebut tidak optimal. Akibatnya terjadi penundaan penyeteroran

laporan dari berbagai bidang bisa membuat pegawai bagian keuangan menjadi kewalahan ketika jadwal penginputan dari pusat telah ditetapkan. Sehingga atas kelemahan-kelemahan akan kualitas waktu maupun kerja dalam menjalankan tugas yang dilaksanakan oleh oknum atau pegawai DPMPSTP Prov. NTT dirasakan belum efektif.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis penerapan aspek akuntansi keperilakuan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.**" Serta tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan aspek akuntansi keperilakuan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek dan lokasi penelitian ini adalah Akuntansi Keperilakuan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kerangka berpikir penelitian tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber: Data Diolah Sendiri

Teknik-teknik yang dilakukan atau diterapkan dalam penelitian ini guna mengumpulkan dan memperoleh data salah sebagai berikut :

a. Observasi

Sugiyono (2018) Observasi merupakan suatu proses pengamatan atau peninjauan langsung. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan kondisi faktual atau kenyataan sebenarnya dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada lapangan untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

b. Wawancara

Sugiyono (2018) Wawancara adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan terstruktur yaitu wawancara maupun pernyataan-pernyataan dengan 2 orang pegawai bagian keuangan dan 1 pegawai sub kepegawaian dan umum dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2018) Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan organisasi seperti dokumen yang berkaitan dengan dokumen tertulis, yang dapat berupa data-data, gambar atau dokumentasi, table dan diagram. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data terkait struktur organisasi, catatan-catatan dokumen yang dimiliki instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengolah data kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran dan atau berupa uraian penjelasan. Miles & Huberman. (1992) menjelaskan bahwa teknik analisis data interaktif adalah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen atau langkah yaitu Pengumpulan data, Reduksi Data, dan Penarikan Kesimpulan. Berikut langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengolah dan menganalisis data:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan sebagai bahan penelitian.

Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dengan menggunakan dan menerapkan sistem trigulasi yaitu gabungan antara Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Reduksi Data

Peneliti mereduksi data dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah atau fokus pada inti masalah. Dalam penelitian ini peneliti memilah data yang akan dibutuhkan mengenai penerapan aspek akuntansi keperilakuan terhadap kinerja pegawai pada DPMPSTSP Provinsi NTT.

c. Penarikan Kesimpulan

Ketika Data sudah disajikan dengan fokus pada permasalahan, maka tahap akhir adalah menarik kesimpulan dalam penelitian ini atau dengan kata lain memberi hasil pada penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Penganggaran

Menurut Yuesti dan Komang (2019) Aspek keperilakuan terkait penganggaran dalam pelaporan keuangan meliputi perilaku dan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. Anggaran diterima secara luas sebagai fokus bagi aktivitas perencanaan jangka pendek organisasi dan dasar sistem dari pengendalian. Aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi dan dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu mendatang. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja atau biasa disebut dengan budaya organisasi.

Aspek penganggaran pada DPMPSTSP Provinsi NTT terkait dengan desain/konstruksi, yang dimana dana/anggaran yang dikeluarkan sudah terealisasi dengan baik dan sudah sesuai denganyang dianggarkan dilihat dari bangunan instansi yang telah di renovasi dari 5 tahun sebelumnya seperti pada ruang pelayanan, ruang bagiankeuangan, dan bagian

administrasi. Adapun pelayanan yang ditawarkan oleh DPMPTSP Provinsi NTT adalah pelayanan perizinan usaha maupun non usaha. Terdapat perubahan yang terjadi terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh pengelola DPMPTSP Provinsi NTT yang dulunya proses pelayanan hanya dapat dilakukan secara offline di kantor, akan tetapi pada saat ini proses pelayanan dapat dilakukan secara online yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS), dengan menggunakan aplikasi tertentu atau mengunjungi wab resmi DPMPTSP Provinsi NTT.

Bentuk pelayanan tersebut sama sekali tidak memungut biaya apapun dari masyarakat, baik secara offline maupun secara online. Sehingga dinas tersebut tidak memiliki pendapatan apapun yang diterima dari masyarakat untuk proses pelayanan yang diberikan tetapi hanya berupa penggantian dana pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kepada DPMPTSP dalam bentuk SPJ yang disetorkan setiap bulannya. Sebagai aktivitas pengeluaran kas mencakup semua pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, baik untuk belanja operasional instansi/dinas, pembayaran yang bersifat panjar, maupun pengeluaran kas untuk pajak. Belanja yang rutinitas operasional dinas seperti pengadaan ATK dan konsumsi pegawai. Sedangkan pembayaran yang bersifat panjar adalah biaya yang dilakukan diawal sebelum barang atau jasa diterima seperti perjalanan dinas. Aktivitas pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran wajib dilengkapi dengan dokumen, bukti-bukti yang lengkap dan sah karena akan digunakan untuk penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), seperti halnya laporan kegiatan, undangan kegiatan atau rapat, daftar hadir, nota dinas dan dokumen pelengkap lainnya.

Bersandar pada lingkup akuntansi keperilakuan pada DPMPTSP disini telah diterapkan secara tidak langsung dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari proses aktivitas pada aspek penganggaran dimana setiap pemeliharaan bangunan selalu dilaporkan dalam bentuk penyusunan anggaran yang dikeluarkan secara rill. Begitu juga dengan aktivitas keseharian yang telah disebutkan dari segi pembayaran baik itu belanja operasional instansi/dinas, pembayaran yang bersifat panjar, maupun pengeluaran kas untuk pajak semua dilengkapi dengan dokumen maupun bukti-bukti yang lengkap dan sah sehingga menghindari kepalsuan data karena rutin dilaksanakan setiap bulannya.

Mengetahui bahwa ketepatan waktu sangatlah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan, aktivitas pegawai dan juga pelayanan

yang diberikan harus sesuai dengan ketetapan waktu penginputan. Pemberian tugas kepada pegawai DPMPTSP lebih disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan pegawai agar kesalahan dalam setiap hasil kerja pegawai bisa kita hindari akibat ketidakpahaman pegawai akan tugasnya yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagaimana pada penyeteroran laporan terkait dengan masalah penundaan yang menjadikan akhir laporan memerlukan beberapa revisi untuk mencapai keseimbangan. Hal itu dikarenakan pengerjaannya yang terburu-buru diakhir bulan dan hingga larut malam. Produktivitas penganggaran tidaknya dalam penyusunan laporan bergantung pada individu yang bekerja pada perusahaan tersebut. Apabila pegawai memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, maka laporan keuangan tersebut bisa disusun dengan mudah. Namun, kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Dibutuhkan juga sikap disiplin, kejujuran dan rasa bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dikerjakan. Maka dari itu, berbicara soal akuntansi keperilakuan itu tidaklah hanya dilihat dari hasil dalam pembuatan laporan keuangan yang berupa angka, tetapi bagaimana pegawai memiliki nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan dalam bekerja seperti kedisiplinan, kejujuran dan bertanggung jawab.

Aspek keperilakuan pada penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran berdampak langsung terhadap perilaku manusia. Anggaran menjelaskan kepada orang-orang mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Anggaran menetapkan batasan pada apa yang boleh dan tidak boleh dibeli atau dibelanjakan. Membatasi tindakan manajemen. Orang-orang merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, kegelisahan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atau rasa lega karena "memenuhi" anggaran.

B. Aspek Pelaporan

Aspek Pelaporan terkait dengan penyeteroran laporan dari berbagai bidang ke bagian keuangan di instansi/dinas tersebut. Dimana sistem di DPMPTSP belum melakukan perubahan atau mengevaluasi manajemen penyeteroran laporan dengan tepat waktu. Menunda-nunda penyeteroran laporan dari berbagai bidang bisa membuat bagian keuangan dan akuntansi menjadi kewalahan ketika jadwal penginputan dari pusat telah ditetapkan. Selalu menunggu jadwal tersebut

yang disampaikan oleh pusat barulah bergerak ekstra untuk menyelesaikan laporan mereka masing-masing.

Penyetoran laporan dari berbagai bidang tidak langsung diinput oleh bagian akuntansi untuk dijadikan sebagai laporan keuangan, akan tetapi bagian akuntansi harus memeriksa kembali berkas yang disetor oleh semua bagian. Terhambatnya terkadang laporan yang disetor mereka tidak lengkap, baik dari segi tanda persetujuan (tanda tangan) dari pihak wewenang yang bertanggungjawab dibidang tersebut maupun rincian data yang tidak sama nilainya antara bukti/nota maupun kwitansi yang ada dengan laporan yang disusun. Hal ini sangat membuat bagian keuangan atau akuntansi harus menghitung Kembali nilai nominal yang sebenarnya.

Perhitungan kembali yang dilakukan oleh bagian keuangan dan akuntansi sebenarnya telah membuang waktu atau menyita waktu mereka untuk menginput lebih cepat di sistem mereka yang sementara sebelum diinput ke sistem yang sebenarnya dari pusat. Berselimit dengan akuntansi keperilakuan ini penerapannya masih sangat minim. Keterlambatan penginputan di sistem sementara akan menciptakan suasana kerja yang terburu-buru ketika dari bagian keuangan dan akuntansi masih sibuk memeriksa laporan dari bagian lain kemudian menginput ke sistem sementara maupun sistem dari pusat. Sifat yang selalu tergesah-gesah bisa membuat inputan data tidak baik. Meskipun diinput sesuai jadwal yang ditetapkan, tetapi bisa jadi laporan tersebut bukanlah rill. Karena karakter dari akuntansi itu sendiri yakni apabila nilai akhir di neraca seimbang, maka belum bisa dikatakan benar. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai akhir di neraca tidak seimbang maka secara otomatis laporan keuangan tersebut sudah tentu salah. Hal ini bisa diketahui ketika dilakukan audit pusat baik yang terjadwal maupun audit surprise yang menampilkan laporan yang berbeda dari hasil input ke sistem pusat dengan laporan fisik dari instansi/dinas bersangkutan.

Padahal kenyataannya dalam pembuatan laporan keuangan tidak cukup dengan hanya bermodalkan bisa namun harus disertai dengan pemahaman yang mumpuni. Ditambah dengan adanya tuntutan untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan, bisa menjadi tekanan tersendiri bagi pihak yang terlibat. Tuntutan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan berbagai persyaratan yang ada mampu membuat pihak pelapor bertindak sesuai dengan tuntutan penerima, hal ini agar pihak

penerima merasa senang dengan hasil dari apa yang pengirim kerjakan. Tanpa memperdulikan cara atau proses pengirim membuat laporan tersebut.

C. Aspek Pengendalian

Penerapan akuntansi keperilakuan pada DPMPSTSP Provinsi NTT terkait dengan aktivitas pegawai melakukan pencatatan transaksi keuangan pada DPMPSTSP Provinsi NTT belum dinilai efektif Dimana disebabkan karena ketika adanya transaksi keuangan yang terjadi tidak dapat dengan langsung diinput kedalam Sistem Pengelolaan Arsip yang Berbasis Teknologi Informasi (SIKD), yang dimana kelemahan dari sistem ini terletak pada jadwal menginput transaksi keuangan atau pada saat proses akrual sehingga transaksi keuangan hanya bisa dikumpulkan dan disimpan sampai pada saat jadwal penginputan kembali terbuka dan setelah itulah transaksi-transaksi keuangan baru dapat terinput kedalam sistem SIKD. Dari keterbatasan pada penginputan transaksi dapat menunda pekerjaan pegawai pada Sub Bagian Keuangan yang semestinya dikerjakan tapi harus menunggu waktu yang ditetapkan. Sementara untuk narasi segi sistem secara manajemen dalam penelitian Aswiputri (2022), mengungkapkan bahwa Sistem informasi manajemen merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan, termasuk penggunaan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur manajemen untuk memecahkan masalah bisnis

Pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi NTT pegawai sudah mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Pegawai pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi NTT tidak mempermasalahkan dengan latar belakang pendidikan pegawai, karena pegawai yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya akan di ikutkan pelatihan sesuai bidang kerja masing-masing pegawai.

Hasil penelitian mengenai Penilaian Kinerja pegawai pada kualitas kerja dapat kita lihat bahwa pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk tanggung jawab dalam pekerjaan pegawai semaksimal mungkin melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan. Kendala yang dilami oleh pegawai adalah dilihat dari kompetensi yang dimiliki, bahwa kompetensi yang dimiliki menjadi kendala tersendiri bagi pegawai khususnya pegawai tetap atau honorer, mengenai kurang mampunya menguasai teknologi sehingga masih menggunakan kemampuan tenaga

kontrak yang lebih berkompeten dibidang ilmu teknologi. Pelaksanaan tugas mendapat tanggung jawab penuh dari pegawai untuk mendapatkan hasil yang baik dibidang pelayanan masyarakat serta evaluasi tentang target kerja yang telah dan akan dilaksanakan sehingga pemahaman kerja pegawai serta instruksi pimpinan tentang tugas kerja yang akan dilaksanakan dapat dijalankan dengan baik.

Penilaian perilaku kerja sebagaimana berkesinambungan dengan dimensi akan penerapan aspek perilaku kerja mencakup yang berbagai hal, seperti integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Hal ini membantu memastikan bahwa lingkungan kerja bebas dari diskriminasi, intimidasi, dan perilaku yang merugikan, serta memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketepatan waktu merupakan salah satu unsur dari informasi yang relevan. Informasi itu tersedia ketika dibutuhkan oleh *user* (*timeliness*).

D. Aspek Perilaku

Penerapan akuntansi keperilakuan pada DPMPTSP Provinsi NTT terkait dengan akuntansi khususnya pada transaksi keuangan dengan menggunakan metode Akrua dinilai masih belum efisien dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan pada DPMPTSP Provinsi NTT yang disebabkan karena ketika adanya transaksi keuangan yang terjadi tidak dapat dengan langsung diinput kedalam Sistem Pengelolaan Arsip yang Berbasis Teknologi Informasi (SIKD), yang dimana kelemahan dari sistem ini terletak pada jadwal menginput transaksi keuangan atau pada saat proses akrua sehingga transaksi keuangan hanya bisa dikumpulkan dan disimpan sampai pada saat jadwal penginputan kembali terbuka dan setelah itulah transaksi-transaksi keuangan baru dapat terinput kedalam sistem SIKD. Dari keterbatasan pada penginputan transaksi dapat menunda pekerjaan pegawai pada Sub.

Bagian Keuangan yang semestinya dikerjakan tapi harus menunggu waktu yang ditetapkan. Akuntansi keperilakuan memfokuskan pada aspek-aspek tanggungjawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas suatu pekerjaan atau bagian tertentu. Perilaku dari anggota organisasi juga turut dilibatkan. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah individu-individu di organisasi telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Perilaku DPMPTSP Provinsi NTT ditunjukkan dengan melibatkan para pegawai secara pasif dan secara aktif. Secara pasif yakni pada saat dilakukan Pelatihan atau bimtek bagi pegawai mengenai segala bentuk kegiatan yang menjadi peningkatan kinerja, sedangkan secara aktif yakni dalam proses pengerjaan tugas sesuai SOP. Perilaku tersebut menunjukkan jika DPMPTSP telah berupaya untuk meningkatkan perilaku kerja yang optimal bagi para pegawai. Orang-orang dalam organisasi bertanggungjawab atas pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Keselarasan tujuan, hal ini akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis kualitatif, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai penerepan aspek akuntansi keperilakuan terhadap kinerja pegawai meliputi:

1. Aspek Produktivitas, dimana penerapan aspek ini masih terbilang belum produktif dilihat dari hasil kerja pegawai dalam hal penyeteroran berkas laporan dari berbagai bidang ke bidang keuangan dan akuntansi yang masih terlambat diserahkan dikarenakan faktor dari pengguna atau pelaksananya.
2. Aspek Kepuasan Kerja, dimana sudah baik dilihat dari pemberian insentif, pemberian penghargaan, dan pujian kepada pegawai sehingga terciptanya kepuasan kerja bagi pegawai.
3. Aspek Etika Kerja, untuk menghasilkan kinerja yang baik harus bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tetapi berdasarkan observasi disiplin atas etika kerja DPMPTSP belum efektif dimana faktor keterlambatan mempengaruhi pekerjaan sehingga dapat membuat kinerja yang dihasilkan kurang baik.
4. Aspek Kualitas Kerja, DPMPTSP dalam melakukan pelayanannya kepada masyarakat sudah bisa dikatakan sangat baik. Hal ini dikatakan karena setiap tahunnya Dinas DPMPTSP selalu melaksanakan bentuk pelatihan atau bimtek kepada pegawainya untuk meningkatkan hasil kerja pegawainya.
5. Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih belum dikategorikan baik atau masih belum optimal. Penulis masih

menemukan banyak perilaku pegawai negeri sipil yang tidak disiplin seperti masih adanya pegawai yang datang terlambat ke kantor dan dalam menyelesaikan pekerjaan masih mengalami penundaan dikarenakan pegawai hadir tidak tepat waktu sehingga membuat penyelesaian pekerjaan lebih lambat dari yang seharusnya.

Saran

Saran penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka penerapan aspek akuntansi keperilakuan terhadap kinerja pegawai yaitu:

1. Perlunya peningkatan produktivitas kerja sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang baik bagi pegawai DPMPSTSP Provinsi NTT. DPMPSTSP perlu melakukan mengevaluasi terhadap pegawai agar penyeteroran laporan dengan tepat waktu dari berbagai bidang ke bidang keuangan untuk menghindari sikap keterlambatan penginputan SPJ pengeluaran yang rutin dilakukan setiap bulan.
2. Pimpinan juga perlu menciptakan suasana/kondisi dan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung peningkatan kepuasan kerja agar mendapatkan hasil kerja yang baik bagi pegawai maupun instansi atau organisasi.
3. Terkait etika kerja, dimana instansi/organisasi lebih meningkatkan lagi perihal kedisiplin pegawai dalam bekerja dengan memberikan evaluasi dalam mematuhi peraturan kerja dan sanksi yang tegas pada pelanggaran yang dilakukan pegawai. Sehingga pegawai akan lebih patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang sudah berlaku.
4. Kualitas kerja DPMPSTSP sudah sangat baik dimana diadakannya pelatihan guna menambah wawasan dan peningkatan mutu bekerja, yang dimana pada pemberian pelatihan dan pengembangan setiap pegawai dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang meliputi pelatihan dan bimbingan teknis.
5. Mengoptimalkan kinerja pegawai sesuai dengan peraturan kerja pegawai guna memperbaiki hasil kerja pegawai agar realisasinya sesuai dengan target. Sistem di DPMPSTSP perlu melakukan

perubahan atau mengevaluasi manajemen waktu dan kerja pegawai terkait dengan kualitas pegawai agar lebih memperhatikan tingkat kehadiran pegawai agar tidak terjadi penundaan pekerjaan.

6. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan penelitian yang sama dengan mengambil lokasi yang berbeda sehingga dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswiputri, M. (2022). Literature Review Determinasi Sistem Informasi Manajemen: Database, Cctv Dan Brainware. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 312-322.
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.821>
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Munandar, A., & Syahputera, R. (2021). Pengaruh Penerapan Aspek Keperilakuan Pada Etika Akuntan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. *Strategi*, 11(02).
- Oktavia, D, D & Peilouw, C. P. (2023). *Mudah Akuntansi Untuk Pemula*. Surabaya. Pustaka Aksara.
- Suartana, I Wayan. (2010). Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi. Jakarta. ANDI.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. ALFABETA
- Yuesti, A., & Merawati, Luh Komang. (2019). Akuntansi Keprilaku (I. Triuwono (ed.); 1st ed.). CV. Noah Aletheia.